

MASALAH RASIAL DI AFRIKA SELATAN

Kirdi DIPOYUDO

"Dari semua tantangan yang kita hadapi, dari semua tujuan yang kita miliki bersama, keadilan rasial adalah salah satu yang paling dasar. Keadilan ini adalah isu dominan masing-masing bangsa dan antar bangsa jaman kita". Demikian Menlu Amerika Serikat Henry Kissinger dalam pidatonya di Lusaka tanggal 27 April 1976.¹ Kita kiranya dapat menyetujui pendapat itu karena masalah rasial adalah salah satu masalah yang paling penting dan mendesak dewasa ini. Itulah juga pendapat PBB yang pada 22 - 28 Agustus 1977 menyelenggarakan suatu konferensi internasional anti apartheid di Lagos. Konferensi yang dihadiri 111 negara, termasuk Indonesia, ini mencari jalan untuk menyelesaikan masalah rasial di Afrika bagian selatan secara damai, dan menghasilkan suatu deklarasi 34 pasal yang dapat dipandang sebagai pernyataan anti apartheid yang paling lengkap sejauh ini. Selain mengutuk politik apartheid Afrika Selatan yang didasarkan atas diskriminasi rasial terhadap rakyat bukan kulit putih, konferensi menyebutkan tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk mengakhirinya.²

Diskriminasi rasial terdapat di banyak negeri, termasuk Amerika Serikat dan Inggris yang menyatakan membela martabat dan persamaan semua orang, tetapi paling menonjol di Afrika Selatan karena dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang serta meresapi segala bidang kehidupan. Oleh sebab itu Afrika Selatan menjadi fokus

1 Dikutip dari *International Affairs Backgrounder*, 28 April 1976, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

2 Lihat *Antara*, 29 Agustus 1977

perjuangan anti rasialisme menuju realisasi keadilan rasial. Dengan pertimbangan ini pembahasan kita akan dipusatkan pada politik rasial apartheid Afrika Selatan. Dan oleh sebab masalah rasial adalah suatu masalah yang berkembang, kita harus juga membicarakan perkembangannya. Maka secara berturut-turut akan dibahas asal mula masalah rasial, perkembangan politik rasial Afrika Selatan, dan perlawanan terhadap politik itu baik dari pihak pemimpin-pemimpin kulit hitam negeri itu maupun dari pihak negara-negara Afrika, negara-negara barat dan PBB. Sebagai penutup akan dijabari prospek dan bentuk penyelesaiannya.

ASAL MULA MASALAH RASIAL AFRIKA SELATAN

Masalah rasial di Afrika Selatan berpangkal pada kenyataan bahwa pendatang-pendatang kulit putih dari Eropa merebut negeri itu dari penduduk kulit hitam dan menggunakan kedudukan mereka yang kuat itu untuk menanamkan kekuatan politik mereka. Sebagai akibatnya, kekuasaan politik itu dewasa ini adalah pada sekitar 4 juta orang kulit putih, sedangkan 18 juta orang kulit hitam tidak mempunyai perwakilan dalam lembaga-lembaga negara Afrika Selatan. Sampai pertengahan abad ke—20 cerita penyerbuan dan pendudukan serta dominasi kulit putih itu pada intinya sama di banyak bagian dunia. Pendatang-pendatang dari Eropa yang lebih unggul perlengkapan ekonomi maupun teknologi dan militernya dengan mudah menundukkan rakyat pribumi Afrika dan secara berangsur-angsur mendapatkan privilese-privilese serta kedudukan serba istimewa.

Akan tetapi pada akhir Perang Dunia II ceritanya mengambil suatu belokan baru. Privilese-privilese mulai disangsikan, khususnya karena privilese-privilese itu dikaitkan dengan warna kulit. Apabila pada abad-abad yang lalu bangsa-bangsa Eropa berebut untuk menundukkan dan menguasai negeri-negeri bukan kulit putih, mereka mulai berebut untuk melepaskan milik-milik kolonial yang menyudutkan mereka. Negara-negara kolonial memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri jajahan mereka satu per satu, kerap kali secara tergesa-gesa tanpa persiapan seperlunya dan tanpa memikirkan apa yang akan menimpa bangsa-bangsa jajahan itu apabila hubungan penguasa dan bawahan itu dipotong secara mendadak. Akan tetapi ada beberapa negeri di mana pendatang-pendatang kulit putih telah berakar dan sudah tidak mempunyai negeri untuk kembali. Afrika Selatan adalah

negeri serupa itu. Pada masa orang-orang kulit putih melepaskan koloni-koloni mereka dan pulang ke negeri asal mereka masing-masing dengan senang atau dengan berat hati, orang-orang kulit putih Afrika Selatan justru berusaha untuk mengukuhkan privilese-privilese dan kekuasaan mereka tanpa mempedulikan protes dunia yang semakin meningkat.

Gerakan dekolonisasi melanda dunia umumnya dan Afrika Selatan khususnya secara tak terduga-duga. Dalam dua dasawarsa ratusan juta orang jajahan mendapatkan kemerdekaan dan penguasa-penguasa kulit putih mereka berkemas-kemas untuk pulang ke Eropa atau tinggal di negeri-negeri itu sebagai penasihat pemerintah-pemerintah baru atau sebagai pengusaha-pengusaha. Akan tetapi halnya berlainan di Afrika Selatan, di mana orang-orang kulit putih juga mempunyai jutaan bawahan, tetapi kedua golongan itu hanya mempunyai satu negeri. Orang-orang kulit putih Afrika Selatan tidak dapat pulang ke tanah air seperti orang-orang Inggris atau Perancis, tetapi juga tidak bersedia memandang bawahan mereka sebagai sesama yang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Oleh sebab itu mereka mempunyai dua alternatif, yaitu terus memerintah rakyat kulit hitam seolah-olah tidak terjadi suatu perubahan atau memberikan kepada mereka suatu otonom tertentu. Sejak memenangkan pemilihan umum tahun 1948, Partai Nasional yang berkuasa di Afrika Selatan sampai sekarang mencoba menempuh dua jalan itu sekaligus, untuk mempertahankan supremasi serta kedudukan istimewa kulit putih di satu pihak dan menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat kulit hitam secara yang tidak mengancam supremasi kulit putih itu.¹

PERKEMBANGAN POLITIK RASIAL AFRIKA SELATAN

Partai Nasional pimpinan Daniel Francois Malan memenangkan pemilihan umum itu dengan program politik apartheid dan segera mulai melaksanakannya. Sebagai pembenaran telah disusunnya suatu teori, teori apartheid. Apartheid adalah suatu campuran antara praktek-praktek kolonial, superioritas rasial kulit putih, teologi kalvinis dan filantropi paternalis, dan pada intinya mengajarkan bahwa setiap ras mempunyai panggilan tertentu dan harus memberikan sumbangan budaya kepada dunia, dan oleh sebab itu ras-ras harus

¹ Mengenai asal mula masalah rasial di Afrika Selatan lihat lebih lanjut Leo Marquard, *A Federation of Southern Africa* (London, 1971), hal. 3—5

dipisah satu sama lain, agar dapat hidup dan berkembang sesuai dengan kepribadian dan kebudayaannya masing-masing. Kontak antara ras yang dapat membahayakan kemurnian budaya ras harus dibatasi. Segregasi dan perkembangan terpisah itu tidak hanya berlaku untuk golongan-golongan rasial yang penting, tetapi juga untuk kelompok-kelompok etnis yang lebih kecil.¹

Berdasarkan teori itu rakyat Afrika Selatan dipecah menjadi empat golongan rasial utama, yaitu kulit putih, kulit hitam, berwarna (darah campuran atau indo) dan Asia, yang masing-masing dipecah lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Secara demikian golongan kulit hitam dipecah menjadi 20 kelompok etnis. Selanjutnya setiap kelompok harus mempunyai tempat tinggal terpisah di Afrika Selatan sebagai negerinya agar dapat hidup dan berkembang secara tersendiri. Dalam rangka itu reservat-reservat kulit hitam hendaknya dikembangkan menjadi apa yang disebut Bantustan atau negeri Bantu.

Di antara pendukung-pendukung apartheid ada yang pertamanya melihatnya sebagai jalan untuk menyematkan supremasi dan kedudukan istimewa golongan kulit putih, tetapi ada juga yang melihat dan memperjuangkan segi-segi positifnya, yaitu pembangunan negeri-negeri masing-masing menjadi negara yang merdeka. Namun kenyataannya kedua pendapat itu tidak banyak berbeda satu sama lain, terutama karena alokasi tanah adalah sangat pincang dan tidak adil. Rakyat kulit hitam yang merupakan 71% penduduk hanya mendapatkan sekitar 13% wilayah negara, dan bagian kulit hitam ini tidak memiliki kekayaan alam maupun industri, sedangkan minoritas kulit putih yang merupakan 16,7% penduduk (1974) menguasai 87,1% tanahnya, termasuk semua kota besar, pusat industri, tambang, pelabuhan dan tanah pertanian yang paling baik.

Kemenangan Partai Nasional tersebut bukan suatu kebetulan, melainkan merupakan hasil situasi Afrika Selatan itu sendiri. Dalam periode agraris masyarakatnya mengembangkan suatu sistem stratifikasi ekonomi dan sosial berdasarkan ras di mana minoritas kulit putih menduduki tempat teratas dan mayoritas kulit hitam tempat terbawah, sedangkan tempat-tempat diantaranya diduduki golongan berwarna dan golongan Asia (India). Ketika kedudukan kulit putih itu

¹ Tentang teori apartheid lihat Denis Worrell, Ed., *South Africa : Government and Politics* (Pretoria, 1971), khususnya bab kelima; dan Neville Curtis, "South Africa : The Politics of Fragmentation", *Foreign Affairs*, 50 (1972), hal 283—289

terancam sebagai akibat perkembangan industri, golongan kulit putih berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dan memperkuatnya. Dengan maksud itu Partai Nasional merumuskan program apartheid.

Setelah berkuasa, Partai Nasional bergerak secara sistematis untuk memperkuat kedudukannya dalam parlemen dan memperluas kekuasaannya di luar parlemen dengan semakin meningkatkan kekuasaan negara. Dalam rangka itu hak-hak politik golongan kulit hitam, berwarna dan Asia, yang telah terbatas, dikurangi dan lambat laun dihapus. Pada tahun 1951 dikeluarkan *Bantu Authorities Act*, yang menghapus Dewan Perwakilan Rakyat Pribumi dan sebagai gantinya menetapkan pembentukan pemerintahan suku, regionali dan teritorial di negeri-negeri Bantu, dan fungsi-fungsi administratif, eksekutif dan kehakimannya. Dalam rangka itu pula Pemerintah pada tahun 1950 mengeluarkan *Suppression of Communism Act*, yang melarang organisasi-organisasi politik yang dikuasai kulit putih tetapi didukung kulit hitam atau memperjuangkan pembentukan suatu masyarakat non-rasial atau pemerintahan mayoritas. Berdasarkan undang-undang itu secara berturut-turut dilarang Partai Komunis (1950), Kongres Demokrasi (1926) dan organisasi-organisasi politik kulit hitam. Pada tahun 1960 Kongres Nasional Afrika (ANC) dan Kongres Pan Afrika (PAC) dilarang dan sejumlah anggotanya, khususnya pemimpin-pemimpinnya dipenjarakan. Secara demikian kekuasaan politik menjadi monopoli kulit putih, sedangkan aspirasi-aspirasi politik golongan-golongan lain disalurkan dengan mengembangkan struktur-struktur kekuasaan di wilayahnya masing-masing secara yang tidak membahayakan kedudukan istimewa minoritas kulit putih.

Sejalan dengan itu Pemerintah Afrika Selatan melaksanakan segregasi rasial di segala bidang kehidupan. Proses itu dimulai dengan segregasi di tempat-tempat umum, kereta api, bis dan alat-alat pengangkutan lain. Pada waktu yang sama dilakukan segregasi perkumpulan-perkumpulan sosial, kebudayaan dan keagamaan. Segregasi tempat tinggal menyusul pada tahun 1950 ketika diundangkan *Group Areas Act*, yang menetapkan area bagi golongan rasial masing-masing. Berdasarkan undang-undang ini banyak orang kulit hitam yang sejauh itu tinggal di daerah kulit putih harus menjual miliknya dan pindah ke area yang ditunjuk bagi mereka. Selanjutnya ditetapkan bahwa orang kulit hitam tidak boleh tinggal di daerah perkotaan kulit putih lebih dari 72 jam tanpa ijin khusus dari Native Labour Officer, dan bahwa dia memerlukan ijin untuk meninggalkan

daerahnya dan memasuki daerah perkotaan. Undang-undang ini memperkuat *Natives Land Act* tahun 1913 dan *Natives (Urban Areas Consolidation) Act* tahun 1945 yang melarang orang kulit hitam memiliki atau membeli tanah di daerah perkotaan.

Pada tahun 1953 dikeluarkan *Native Labour (Settlement of Disputes) Act* yang menetapkan Native Labour Officer sebagai penguasa tertinggi dalam penyelesaian sengketa-sengketa industri yang melibatkan tenaga kerja kulit hitam, lagi pula melarang pemogokan kulit hitam. *Native Building Workers Act* tahun 1951 dan *Industrial Conciliation Act* tahun 1956 menetapkan reservasi pekerjaan ahli bagi orang-orang kulit putih.

Segregasi pendidikan dilaksanakan dengan *Bantu Education Act* tahun 1953, yang mengakhiri pendidikan bersama, menempatkan pendidikan rakyat kulit hitam di bawah kekuasaan Pemerintah Afrika Selatan, dan menjaga jangan sampai orang-orang kulit hitam menerima pendidikan untuk kedudukan-kedudukan yang tidak diperuntukkan mereka. Pada tahun 1959 menyusul *Separate University Act* yang melaksanakan segregasi pendidikan tinggi.¹

Golongan-golongan rasial lainnya, khususnya rakyat kulit hitam, menolak politik apartheid itu dan menentangnya dengan tegas. Mereka melihatnya sebagai siasat minoritas kulit putih untuk mempertahankan supremasi dan kedudukan istimewanya dan sebagai diskriminasi rasial yang tidak adil. Mereka menuntut hak-hak politik mereka dan bagian kekayaan Afrika Selatan yang juga merupakan hasil usaha dan kerja mereka. Dalam perjuangan ini mereka mendapat dukungan dan bantuan dari negara-negara Afrika dan banyak negara lainnya, yang dengan keras mengutuk politik apartheid, dan dengan berbagai cara berusaha menekan rezim kulit putih Afrika Selatan agar menghapusnya dan menghormati hak-hak golongan golongan rasial lainnya.

Di bawah tekanan-tekanan itu, Pemerintah Afrika Selatan mulai menonjolkan segi-segi positif apartheid dengan meningkatkan usaha pembangunan wilayah masing-masing kelompok. Pada tahun 1959 dikeluarkan *Bantu Self Government Act*, yang selain menghapus

¹ Tentang pelaksanaan politik apartheid lihat G.M. Carter, *The Policies of Inequality in South Africa since 1948* (London, 1959); J.D. Omer - Cooper, "South Africa, History", *Africa South of the Sahara 1975* (London, 1975), hal. 765—766; dan ³³"Apartheid", *The Economist*, 26 Nopember 1977

Representation of Natives Act tahun 1936, yang memberikan perwakilan terbatas dalam parlemen kepada rakyat kulit hitam juga menetapkan pembagian rakyat kulit hitam itu dalam delapan satuan nasional, yang akan dikembangkan menuju otonomi dan kemerdekaan. Dengan maksud itu dibentuk Kementerian untuk Pemerintahan, Pembangunan dan Pendidikan Bantu, dan ditunjuk seorang Komisaris Jenderal untuk satuan masing-masing, yang akan bertindak sebagai wakil Pemerintah Afrika Selatan dan membantu penguasa-penguasa Bantu dalam pembangunan itu.

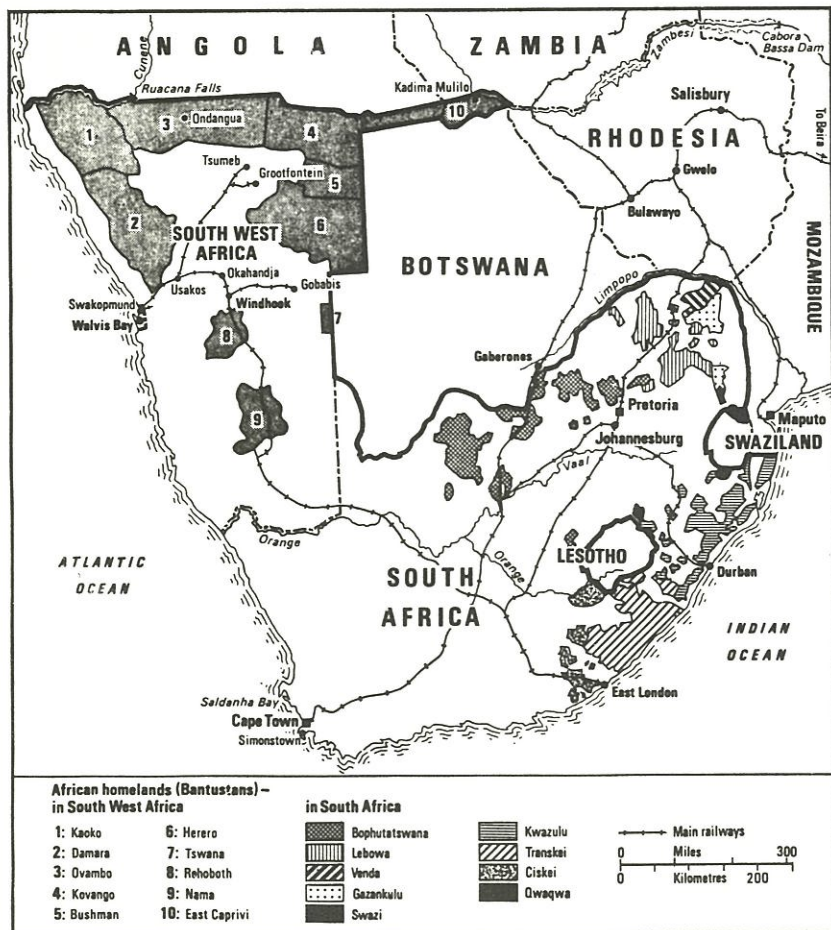
Sebagai lanjutannya, pada tahun 1971 dikeluarkan *Bantu Homelands Constitution Act*, yang memberi kuasa kepada Pemerintah Afrika Selatan untuk memberikan otonomi kepada negeri kulit hitam yang telah mempunyai Pemerintah Teritorial seperti yang telah diberikan kepada Transkei (1963). Menurut undang-undang ini negeri masing-masing dapat mempunyai bendera dan lagu kebangsaannya sendiri, tetapi dilarang mempunyai tentara atau organisasi serupa, mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, mendirikan pabrik senjata atau bahan peledak, membuat undang-undang yang mengatur pengangkutan, pos dan telekomunikasi, keuangan dan imigrasi.

Berdasarkan undang-undang itu Bantustan-Bantustan mendapatkan Majelis Legislatif, yaitu Tswanaland April 1971, Ciskei Agustus 1972, Lebowa Oktober 1972, Gazankulu dan Vhavenda Pebruari 1973, Kwazulu bulan berikutnya dan Basotho Quaqua Nopember 1974 (lihat Peta). Majelis-majelis itu kemudian memilih seorang Perdana Menteri dan beberapa orang Menteri yang bersama-sama merupakan Pemerintah Bantustan.¹

Di antara negeri-negeri Bantu yang paling maju perkembangannya ialah Transkei, negeri suku bangsa Xhosa. Pada tahun 1955 Bunga atau Dewan Umum Persatuan Wilayah-wilayah Transkei menerima baik Bantu Authorities Act tahun 1951 dan tahun berikutnya mengubah dirinya menjadi Trankeian Territorial Authority, yang pada 1960 diakui Pemerintah Afrika Selatan sebagai Transkei Territorial Authority berdasarkan Bantu Self—Government Act tersebut. Bulan Januari 1962 diumumkan bahwa suku bangsa Xhosa dari Transkei akan menjadi bangsa Bantu pertama yang siap untuk self-

¹ Lihat "The Bantu Homelands", *Africa South of the Sahara 1975* (London, 1975), hal. 811—813; dan Muriel Horrell, *The African Homelands of South Africa* (Johannesburg, 1973)

AFRIKA SELATAN



Sumber: Peter Janke, "Southern Africa : New Horizons", *Conflict Studies* No. 73, Juli 1976, hal. 11

government, langkah terakhir sebelum kemerdekaan. Konstitusinya diundangkan Parlemen Afrika Selatan bulan Mei 1963 dan bulan Nopember tahun itu juga rakyat memilih 45 orang untuk duduk dalam Majelis Legislatif bersama-sama dengan 64 orang kepala suku, termasuk 4 orang kepala yang penting. Parlemen ini kemudian memilih Chief Kaizer Matanzima sebagai Perdana Menteri dan lima orang Menteri.

Pada bulan Mei 1974 PM Matanzima mengajukan permintaan kepada Pemerintah Afrika Selatan agar memberikan kemerdekaan kepada Transkei dalam waktu lima tahun. Permintaan ini diterima dengan baik dan persiapan-persiapan ditingkatkan. Akhirnya pada 26 Oktober 1976 Transkei mendapatkan kemerdekaan sebagai Bantustan pertama yang mencapai status itu. Secara otomatis sekitar 3.300.000 orang Xhosa kehilangan kewarganegaraan Afrika Selatan dan menjadi warga negara Transkei, biarpun 1.500.000 orang tinggal di luar wilayahnya. Kemerdekaan itu disambut dengan gembira oleh rakyat dan Pemerintah Transkei, tetapi mendapatkan tanggapan negatif dari negara-negara kulit hitam dan kebanyakan negara lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara itu menolak mengakuinya, terutama karena merasa bahwa mengakuinya akan berarti membenarkan politik apartheid Afrika Selatan yang mereka kecam secara terus-menerus. Atas prakarsa sejumlah negara Afrika, Majelis Umum kemudian mengeluarkan suatu resolusi yang menyatakan kemerdekaan itu tidak sah dan sekali lagi mengutuk politik apartheid Afrika Selatan.¹

Namun kemerdekaan Transkei itu menunjukkan, bahwa Afrika Selatan bertekad untuk meneruskan program Bantustannya. Kenyataannya Bantustan Bophuthatswana mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1977. Selain itu pada awal sidang parlemen Afrika Selatan tahun 1977 diumumkan, bahwa Pemerintah akan mempermudah proses untuk mendapatkan otonomi bagi negeri-negeri Bantu yang belum minta kemerdekaan. Dewasa ini sedang digarap suatu rancangan undang-undang yang memberikan kekuasaan dalam negeri penuh kepada Bantustan-Bantustan. Afrika Selatan hanya akan menanganai urusan-urusan internasional bagi Bantustan yang belum merdeka.²

1 Lihat R. Schrire, "The Emancipation of Transkei", *The World Today*, 33 (1977), hal. 34—38

2 Lihat Cas de Villiers, "South Africa — A Changing Society", *Focus*, Pebruari 1977, hal. 20

PERLAWANAN TERHADAP POLITIK APARTHEID

Diskriminasi rasial di Afrika Selatan secara sistematis dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang, setelah Partai Nasional berkuasa, tetapi telah ada sebelumnya. Bahkan harus dikatakan bahwa diskriminasi rasial itu adalah inheren dalam setiap pemerintahan kolonial. Di mana pun kaum penjajah merasa dirinya lebih unggul dari rakyat jajahannya dan memperlakukan mereka sesuai dengan anggapan itu. Hal itu juga berlaku di Afrika Selatan di mana pendatang-pendatang kulit putih berhasil menundukkan dan menguasai rakyat pribumi, dan secara berangsur-angsur merampas atau mengurangi hak-haknya.

Rakyat kulit hitam menolak klaim kulit putih bahwa secara kodrat orang kulit putih memiliki keunggulan dan hak untuk memimpin, dan untuk menyatakan penolakan itu antara lain ke luar dari gereja-gereja yang dikuasai golongan kulit putih untuk membangun gereja-gereja mereka yang merdeka. Sejalan dengan gerakan itu, orang-orang kulit hitam yang menerima pendidikan barat mulai mengambil langkah-langkah untuk membentuk gerakan-gerakan politik. Pada tahun 1880—an mereka mendirikan *Cape Native Voters Association*. Demikianpun golongan berwarna pada tahun 1902 mendirikan *African Peoples Organization (APO)*.

Ketika rancangan konstitusi Uni Afrika Selatan disusun, rakyat bukan kulit hitam melihat ketentuan-ketentuannya mengenai hak suara sebagai ancaman bagi hak-hak politik mereka. Sehubungan dengan itu *South African Native National Conference*, organisasi politik rakyat Afrika yang pertama, dan APO mengirimkan delegasi ke London untuk mengajukan protes, tetapi tidak berhasil. Pada tahun 1910 rancangan ini disahkan dan Afrika Selatan mulai kehidupannya sebagai negara kesatuan (Uni Afrika Selatan) di mana minoritas kulit putih mendapatkan monopoli atas kekuasaan politik.

Sebagai reaksi lahiriah pada 1912 *South African National Congress (SANC)*, yang kemudian mengubah namanya menjadi *African National Congress (ANC)*, sebagai suatu organisasi politik. Mula-mula sarannya terbatas pada usaha agar golongan elit Afrika diterima secara sosial dan politik dalam masyarakat yang dikuasai kulit putih. Mereka berusaha mencapai sarannya itu lewat jalan konstitusionil, tetapi setahun kemudian mengubah perjuangan mereka,

ketika Pemerintah Afrika Selatan mengeluarkan *National Land Act*, yang antara lain melarang orang kulit hitam membeli tanah atau hidup di wilayah kulit putih sebagai penyewa atau penggarap dengan bagi hasil. Berdasarkan undang-undang itu rakyat kulit hitam diusir dari wilayah kulit putih secara massal. ANC mengajukan protes tetapi sia-sia.

Pada tahun 1919—1920 ANC melancarkan suatu kampanye lain untuk menentang peraturan-peraturan yang mewajibkan rakyat kulit hitam. membawa pas, yang bukan hanya merupakan tanda kenal dan ijin tinggal tetapi juga alat untuk menguasai migrasi penduduk kulit hitam. ANC mensponsori suatu demonstrasi membakar pas yang dibenci itu sebagai protes, tetapi Pemerintah mengambil tindakan-tindakan tegas yang mengakibatkan kemunduran ANC. Untuk sementara peranannya diambil alih oleh *Industrial and Commercial Union (ICU)* yang didirikan pada 1919, tetapi kemudian ANC menjadi giat lagi.

Dengan meningkatnya diskriminasi rasial terhadap rakyat bukan kulit putih meningkat pula oposisi nasionalisme Afrika. ANC memperluas keanggotaannya dan berkembang menjadi suatu organisasi massa, dan pada tahun 1940—an membentuk suatu sayap muda yang lebih radikal dan akhirnya berhasil menguasainya. Pada tahun 1952 orang-orang kulit hitam, berwarna dan India serta sejumlah orang kulit putih melancarkan suatu perlawanan pasif. Dengan sengaja mereka melanggar undang-undang apartheid di muka umum dan membiarkan dirinya ditangkap. Pemerintah menangkap sekitar 8.000 orang demonstran dan di Port Elisabeth berkobar kerusuhan-kerusuhan. Untuk menghadapinya Pemerintah mengeluarkan undang-undang darurat.

Pada tahun 1955 kelompok-kelompok rasial yang menentang apartheid, termasuk ANC, SAIC, Coloured Peoples Political Organization dan White Congress of Democrats mengadakan pertemuan di Kliptown dekat Johannesburg dan menyusun suatu *Freedom Charter*,¹⁾ yang menggariskan dasar-dasar bagi Afrika Selatan yang demokratis dan non-rasial. Bulan Desember 1956 Pemerintah menangkap 156 orang pemimpin gerakan itu atas tuduhan berkomplot untuk menggulingkan Pemerintah. Proses itu berlarut-larut dan baru pada tahun 1961 berakhir dengan pembebasan para terdakwa. Sementara itu ANC kehilangan pemimpin-pemimpinnya dan pada 1958 sejumlah anggotanya memisahkan diri dan mendirikan *Pan Africanist*

Congress (PAC) di bawah pimpinan Robert Sobukwe, karena merasa bahwa kerjasama dengan kelompok-kelompok rasial lain melemahkan perjuangan. Akan tetapi politiknya tidak banyak berbeda dengan politik ANC.

Sebagai protes terhadap *Bantu Self-Government Act* yang dikeluarkan dalam rangka program Bantustan, pada 1960 dilancarkan suatu perlawanan di Pondoland Timur yang meluas ke seluruh Pondoland. Dengan membakar rumah-rumah kolaborator dengan Pemerintah dan memboikot pedagang-pedagang kulit putih yang menyiarkan informasi tentang gerakan mereka, mereka berhasil menguasai sebagian besar Pondoland. Pemerintah mendatangkan pasukan-pasukan dan mengumumkan keadaan darurat, dan secara demikian berhasil mematahkan pemberontakan itu.

Bulan Maret tahun 1960 itu juga PAC melancarkan kampanye anti pas, dan untuk mengatasinya polisi melepaskan tembakan-tembakan ke arah para demonstran yang berkumpul di sekitar pos polisi di Sharpeville. Tujuh puluh tujuh orang tewas sebagai korban. Sebagai protes diadakan demonstrasi-demonstrasi baik di Afrika Selatan maupun di luar negeri. Pemerintah menanggapi dengan menangkap Sobukwe dan melarang ANC maupun PAC. Dengan demikian jalan legal tertutup.¹

Pembantaian di Sharpeville dan larangan terhadap organisasi-organisasi politik di kalangan rakyat kulit hitam itu merupakan titik balik dalam sejarah pembebasan Afrika Selatan. Kejadian-kejadian itu meyakinkan pemimpin-pemimpin kulit hitam dan pengikut-pengikut mereka, bahwa sasaran-sasaran perjuangan mereka tidak dapat dicapai dengan cara-cara damai tetapi hanya lewat jalan kekerasan. Dengan keyakinan itu pada tahun 1961 dan 1962 mereka mendirikan dua organisasi rahasia, yaitu Umkhonto we Sizwe dan Poso, untuk mencapai perubahan-perubahan politik lewat sabotase terhadap milik kulit putih.

Dengan demikian konflik antar ras mengarah pada gerakan kekerasan yang akan terus meningkat kecuali kalau sementara itu terjadi perubahan radikal dalam sistem Afrika Selatan. Sejak itu banyak orang muda meninggalkan tanah air untuk mendapatkan latihan gerilya dan subversi di luar negeri. Kemudian mereka berusaha kembali

¹ Tentang perlawanan rakyat Negro terhadap politik apartheid lihat James Barber, *South Africa's Foreign Policy 1945—1970* (London, 1973), hal. 120—141; lihat juga J.D. Omer—Cooper, *loc. cit.*, hal. 788—792

ke Afrika Selatan untuk menyiapkan gerilya dan pemberontakan, tetapi pemerintah mengadakan pengawasan yang sangat ketat. Dewasa ini mereka belum dapat berbuat banyak, tetapi mereka telah bertekad untuk melakukan infiltrasi dan sabotase serta subversi.

Di Afrika Selatan itu sendiri tekanan-tekanan semakin meningkat dan pada suatu ketika kiranya akan dapat mengobarkan suatu pembangkangan dan pemberontakan massal. Kemungkinan ini telah menimbulkan kekuatiran di kalangan kulit putih, dan kejadian-kejadian kemudian menunjukkan bahwa kekuatiran itu beralasan. Pada tahun 1972 muncul suatu gerakan di antara mahasiswa kulit hitam, berwarna dan India, yang dilancarkan oleh Organisasi Mahasiswa Afrika Selatan (SASO) dan mengobarkan bentrokan-bentrokan berdarah dengan pasukan-pasukan keamanan. Sebagai reaksi terhadap kejadian-kejadian itu, dilancarkan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa di universitas-universitas yang berbahasa Inggris biarpun ditindak dengan keras oleh polisi. Hal ini mengungkapkan adanya keresahan batin, khususnya di kalangan kaum muda kulit putih.

Kejadian-kejadian itu juga memberikan keberanian kepada pemimpin-pemimpin Bantustan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Pemerintah Afrika Selatan. Mereka bepergian ke luar negeri untuk mencari dukungan bagi perjuangan mereka. Di bawah pimpinan Chief Buthelezi dari Kwazulu, mereka tidak hanya menuntut wilayah yang lebih luas dan percepatan proses menuju kemerdekaan, melainkan juga penghapusan diskriminasi sosial dan ekonomi.¹ Dengan demikian negeri-negeri Bantu itu bukan menjadi penyaluran aspirasi-aspirasi politik yang aman dan secara demikian menyelamatkan stratifikasi sosial yang didasarkan atas ras, melainkan bahkan menjadi pusat-pusat tekanan atas Pemerintah Afrika Selatan agar mengadakan suatu transformasi radikal dalam sistem sosial dan politiknya.

Dalam keadaan itu Pemerintah menjadi tidak menentu. Di satu pihak dia memberikan janji-jani akan kemerdekaan penuh kepada negeri-negeri Bantu dalam satu dasawarsa. Di lain pihak dia memperingatkan pemimpin-pemimpin Bantu agar membatasi perjalanan luar negeri dan menghentikan kecaman-kecaman mereka terhadap masyarakat Afrika Selatan. Protes-protes mahasiswa ditindak dengan

1 Lihat J.D. Omer—Cooper, *loc. cit.*, hal. 791

tegas, Politik "outward looking" Afrika Selatan dan seruan-seruan kepada negara-negara Afrika untuk mengadakan dialog mengalami kemunduran-kemunduran, dan hubungan Afrika Selatan dengan negara-negara tetangganya menjadi dingin. Pada waktu yang sama anggaran pertahanan ditingkatkan secara tajam.¹

Pada tahun 1973 kaum buruh kulit hitam mengadakan pemogokan untuk menuntut perbaikan nasib dan upah yang lebih tinggi. Mengingat luasnya pemogokan itu dan tekad kaum buruh untuk mendapatkan hak-hak mereka, Pemerintah Afrika Selatan memberikan konsesi-konsesi, terutama pula karena upah-upah memang terlalu rendah. Upah minimal dinaikkan 32—54% dengan kemungkinan untuk menyesuaikan lagi apabila biaya hidup meningkat. Lebih penting lagi, hak mogok diakui, biarpun buruh kulit hitam belum boleh berserikat untuk memperjuangkan hak-hak mereka seperti buruh kulit putih. Juga diakui perlunya meningkatkan kesempatan latihan bagi buruh kulit hitam dan berwarna agar mereka dapat maju dan perekonomian dapat memanfaatkan tenaga kerja secara yang lebih efisien. Semua itu berarti suatu penyimpangan dari dasar politik apartheid.

Pergolakan buruh itu juga telah mendorong Buthelezi untuk menggunakan kedudukannya guna menuntut perubahan sosial dan ekonomi di seluruh Afrika Selatan. Dia menyatakan mendukung para pemogok dan menuntut hak untuk berunding dengan Pemerintah sebagai juru bicara mereka. Biarpun ditolak, tindakannya itu meningkatkan reputasinya baik di dalam maupun di luar negeri. Menjelang akhir tahun 1973 itu pemimpin-pemimpin Bantustan mengadakan pertemuan dan membicarakan kemungkinan pembentukan federasi negeri-negeri Bantu serta mengutuk diskriminasi rasial di Afrika Selatan. Bulan Juli 1974 Dewan Perwakilan Rakyat Berwarna yang dibentuk tahun 1969 sebagai parlemen terpisah bagi rakyat berwarna, membubarkan diri dan menuntut perwakilan bagi semua ras dalam parlemen Afrika Selatan.

Sebagai hasil pertemuan tersebut, pemimpin-pemimpin Bantustan mencapai sepakat kata untuk membentuk suatu federasi setelah mendapatkan kemerdekaan dan minta kepada pemerintah Afrika Selatan agar diberi tanah yang lebih luas, tetapi permintaan ini ditolak. Pada

¹ Lihat "White Africa at Bay", *Newsweek*, 7 Juni 1976; dan Ruth First, "South Africa and Black Africa", *Africa Guide 1978* (Saffron Walden, 1977), hal. 63—68

tahun 1974 mereka mengadakan pertemuan dengan PM Vorster untuk pertama kalinya. Pembicaraan-pembicaraan adalah terus terang, tetapi PM Vorster tetap pada pendiriannya untuk menolak gagasan federasi maupun permintaan akan tambahan wilayah bagi negeri Bantu masing-masing.

Kejadian-kejadian tahun 1973 dan 1974 itu menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin Bantustan menjadi semakin sadar akan kekuatan politik mereka dan bahwa perlawanan mereka terhadap diskriminasi rasial maupun program Bantustan semakin meningkat. Kekecualian adalah Matanzima dari Transkei, yang bulan Mei 1974 mengumumkan maksudnya untuk minta kemerdekaan Transkei dalam waktu lima tahun sesuai dengan politik Pemerintah Afrika Selatan. Bulan Nopember 1974 delapan pemimpin Bantustan menandatangani bahwa negeri-negeri Bantu itu harus menjadi bagian integral Afrika Selatan dan mendapat bagian yang wajar dari kekayaannya serta persamaan hak dalam suatu federasi. Hal ini bertolak belakang dengan politik Pemerintah Afrika Selatan untuk membagi rakyatnya dalam kelompok-kelompok dan untuk mendorong kelompok masing-masing agar minta kemerdekaan sebagai kesatuan terpisah. Oleh sebab itu PM Vorster menolak usul mereka agar diselenggarakan suatu konvensi multirasial guna menyusun suatu konstitusi baru, dan menyatakan tidak akan mengikutsertakan rakyat kulit hitam dalam kekuasaan negara.¹

Tekanan-tekanan itu semakin meningkat sejak Juni 1976, ketika sekitar 10.000 orang pelajar melancarkan suatu demonstrasi protes di Soweto yang berkembang menjadi huru-hara di kota-kota kulit hitam dekat Johannesburg dan Pretoria yang minta korban ratusan orang tewas dan lebih dari seribu orang luka-luka. Tekanan-tekanan itu mencapai puncak baru pada bagian kedua bulan September 1977 ketika Steve Biko, pemimpin Black Consciousness Movement yang mendalangi protes-protes tersebut, meninggal dalam tahanan. Di banyak tempat diadakan pertemuan-pertemuan protes dan terjadi bentrokan-bentrokan dengan polisi.²

1 Lihat *Indonesian Observer*, 11 Oktober 1976

2 Lihat *Antara*, 14 September 1977; dan Black Consciousness Movement", *The Economist*, 24 September 1977

PERLAWANAN NEGARA—NEGARA AFRIKA

Perjuangan melawan politik apartheid Afrika Selatan tidak hanya dilakukan oleh rakyat kulit hitam yang bersangkutan dan pemimpin-pemimpin Bantustan, tetapi juga oleh negara-negara Afrika, OPA dan PBB. Setelah berabad-abad mengalami penindasan oleh negara-negara kolonial, bangsa-bangsa Afrika yang belum lama mendapatkan kemerdekaan itu dengan keras mengutuk kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya, rezim-rezim minoritas kulit putih, serta politik apartheid, dan berjuang untuk melenyapkannya.¹

Dengan berbagai cara negara-negara itu berusaha menekan rezim minoritas kulit putih Afrika Selatan agar mengakhiri politik apartheid-nya dan menghormati hak-hak rakyat kulit hitam. Kecuali Malawi dan beberapa negara kecil yang bergantung padanya, mereka memboikotnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan perhubungan. Dan mereka memanfaatkan kedudukan mereka di PBB di mana mereka menguasai sekitar sepertiga suara, untuk mempengaruhi opini dunia dan memperjuangkan resolusi-resolusi yang dapat menekan Afrika Selatan. Berkat perjuangan mereka itu, PBB mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengutuk politik apartheid Afrika Selatan, dan berseru kepadanya agar mengakhirinya. Oleh sebab Pemerintah Afrika Selatan menganggap sepi resolusi-resolusi itu, PBB mengeluarkan resolusi-resolusi lain, yang selain mengulangi kecaman-kecaman itu juga berseru kepada negara-negara agar mengucilkan negara rasialis itu, dan menghentikan penjualan senjata serta perlengkapan militer kepadanya.

Misalnya pada 1 april 1960 Dewan Keamanan berseru kepada Pemerintah Uni Afrika Selatan agar mengambil tindakan-tindakan untuk mewujudkan harmoni rasial atas dasar persamaan, dan melepaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan apartheid dan diskriminasi rasialnya. Pada 7 Agustus 1963 Dewan Keamanan mengulangi seruannya itu sambil berseru kepada negara-negara agar menghentikan penjualan senjata, amunisi dan perlengkapan militer kepada Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan menganggap sepi seruan-seruan itu, pada 4 Desember 1963 Dewan mengutuk sikap acuh tak acuhnya dan mengulangi seruannya kepada negara-negara agar mengenakan em-

1 Mengenai perlawanan negara-negara Afrika kulit hitam terhadap politik apartheid lihat James Barber, *op. cit.*, hal. 143—180; dan Martin Minogue dan Judith Molloy, Ed., *African Aims and Attitudes* (London, 1974), antara lain hal. 258

bargo senjata terhadapnya. Oleh sebab banyak negara juga mengabaikan seruan embargo itu, pada 23 Juli 1970 Dewan Keamanan selain mengulangi oposisinya terhadap politik apartheid Pemerintah Afrika Selatan, dan mengukuhkan resolusi-resolusi sebelumnya, juga mengutuk pelanggaran-pelanggaran embargo senjata dan berseru kepada semua negara agar memperkuat embargo itu dan mematuhiinya dengan saksama.¹

Sehubungan dengan jatuhnya banyak korban, ketika pasukan-pasukan keamanan Afrika selatan melepaskan tembakan-tembakan terhadap orang-orang Afrika yang berdemonstrasi menentang diskriminasi rasial pada 16 Juni 1976 di Soweto seperti tersebut di atas, Dewan Keamanan pada 19 Juni 1976 mengutuk dengan keras Pemerintah Afrika Selatan, mengukuhkan bahwa politik apartheid adalah suatu kejahatan melanggar kata hati dan martabat manusia serta secara serius mengganggu perdamaian dan keamanan internasional, mengakui sahnya perjuangan rakyat Afrika Selatan untuk menenyapkan apartheid dan diskriminasi rasial, dan berseru kepada Pemerintah Afrika Selatan agar menghentikan kekerasan terhadap rakyat Afrika dan mengambil tindakan-tindakan untuk mengakhiri apartheid dan diskriminasi rasial.²

Selain itu negara-negara Afrika menyerang klaim Afrika Selatan untuk terus memerintah Afrika Barat Daya yang sejak 1968 dikenal sebagai Namibia, bekas koloni Jerman yang oleh Liga Bangsa-Bangsa ditempatkan di bawah kekuasaannya sebagai negeri mandat. Berkat perjuangan mereka, bulan Oktober 1966 Sidang Umum PBB menerima suatu resolusi yang menyatakan bahwa Afrika Selatan kehilangan haknya untuk memerintah Afrika Barat Daya karena melanggar kewajibannya untuk "sebaik mungkin memajukan kesejahteraan materiil dan moral rakyat dan kemajuan sosial", dan dengan pertimbangan itu minta kepada Afrika Selatan agar menyerahkan pemerintahan atas negeri itu kepada sebuah dewan yang akan dibentuk PBB dengan maksud itu. Akan tetapi Afrika Selatan menyanggah hak PBB untuk secara sepihak menghapus mandat dan menentang segala usaha untuk melaksanakan resolusi itu.

1 Lihat James Barber, *op. cit.*, hal. 142—159

2 Lihat Peter Janke, "Southern Africa : New Horizons", *Conflict Studies*, Juli 1976, hal. 14—15; dan Roger Murray, "Namibia. Political Developments", *Africa Guide 1978*, hal. 209—212

Dewan Namibia yang dibentuk berdasarkan resolusi itu memberitahukan kepada Sidang Umum PBB dalam laporan pertamanya, bahwa akibat perlawanan Afrika Selatan dia tidak berhasil mengambil alih kekuasaan, dan mengusulkan agar Dewan Keamanan bertindak, akan tetapi usul itu tidak berhasil mendapatkan dukungan berbagai negara besar anggota Dewan. Afrika Selatan menjadi lebih berani dan pada 1969 menganeksir Afrika Barat Daya dan menetapkannya sebagai propinsinya yang kelima. Baik negara-negara Afrika maupun PBB menyatakan tindakan itu tidak sah, tetapi tidak mampu mengambil tindakan yang efektif terhadap Afrika Selatan.¹

SIKAP NEGARA—NEGARA BARAT

Negara-negara Barat, yang menyatakan menjunjung tinggi persamaan hak dan martabat semua orang, juga tidak setuju dengan diskriminasi rasial dan politik apartheid Afrika Selatan, tetapi mula-mula tidak berbuat sesuatu untuk melenyapkannya selain mendukung resolusi-resolusi anti apartheid PBB, antara lain karena mempunyai banyak kepentingan di Afrika Selatan.² Negeri ini merupakan salah satu sumber utama bahan-bahan mentah yang dibutuhkan industri dan kehidupan di negara-negara tersebut. Sehubungan dengan itu perusahaan-perusahaan Barat menanamkan banyak modal (lebih dari US\$ 8.000 juta tahun 1976) bagi eksploitasinya dan pembangunan industri di negeri itu. Dalam proses itu perdagangan antara mereka semakin meningkat dan mencapai lebih dari US\$ 8.000 juta tahun 1976. Selain itu berkat letak geografisnya Afrika Selatan mempunyai arti yang penting bagi strategi global negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Afrika Selatan menguasai jalur-jalûr pelayaran Tanjung Harapan yang merupakan urat nadi mereka. Sebagian besar suplai minyak dan bahan-bahan mentah yang vital diangkut lewat jalur-jalur itu.³

1 Lihat "United Nations Security Council Resolutions on Apartheid", *Notes and Documents*, Juni 1976, publikasi Centre against Apartheid PBB

2 Tentang sikap semula negara-negara Barat terhadap Afrika Selatan lihat James Barber, *op. cit.*, hal. 285—301

3 Lihat Walter F. Hahn dan Alvin J. Cottrell, *Soviet Shadow over Africa* (Washington, 1976); dan W. van Rensburg dan Demond Pretorius, *South Africa's Strategic Minerals: Pieces on a Continental Chessboard* (Arcadia, 1977)

Akan tetapi dengan meningkatnya tekanan-tekanan internasional atas politik apartheid, negara-negara itu juga berusaha meyakinkan Afrika Selatan agar mengadakan perubahan-perubahan yang mendalam menuju penghapusan diskriminasi rasial serta politik apartheid dan pelaksanaan persamaan kesempatan serta hak bagi seluruh rakyatnya. Mereka menginginkan agar perubahan-perubahan itu terjadi secara damai dan berusaha mencegah meningkatnya konflik rasial itu menjadi suatu peperangan rasial luas yang mudah melibatkan negara-negara lain. Mereka menyadari bahwa perkembangan serupa ini akan memberikan peluang kepada Uni Soviet dan negara-negara sekutunya untuk turun tangan dan memperluas pengaruhnya di Afrika bagian selatan. Negara-negara Afrika yang telah bertekad untuk melenyapkan politik apartheid juga semakin menekan mereka agar mematuhi resolusi-resolusi PBB yang dimaksud untuk mengucilkan Afrika Selatan dan memaksanya mengadakan perubahan-perubahan yang mendalam dalam politik rasialnya. Negara-negara itu minta kepada mereka agar pernyataan dukungan mereka bagi persamaan martabat dan hak semua orang dituangkan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat memperlemah kekuatan-kekuatan rasialisme dan kolonialisme di Afrika bagian selatan agar rakyat kawasan itu dapat lebih cepat memperoleh kemenangan tanpa pertumpahan darah.¹

KEADAAN SEKARANG

Di bawah tekanan-tekanan baik dalam maupun luar negeri itu, Pemerintah Afrika Selatan berusaha menghapus tanda-tanda apartheid yang paling menyolok seperti segregasi hotel, restoran, park, olahraga dan sebagainya, tetapi masih tetap mempertahankan sistem apartheidnya sendiri. Program Bantustan diteruskan dan permintaan akan tanah yang lebih luas tetap ditolak. Sebaliknya dia berusaha menampung aspirasi-aspirasi politik golongan berwarna dan India dengan menyusun suatu rancangan konstitusi baru yang menetapkan adanya tiga parlemen masing-masing dengan 185, 95, 46 anggota, 1 kabinet baru 13 orang menteri termasuk 3 orang PM, 5 orang kulit putih, 3 orang berwarna dan 2 orang India, 1 badan pemilih Presiden 88 orang, yaitu 50 orang kulit putih, 25 orang berwarna dan 13 orang India, yang akan dipilih parlemen masing-masing golongan. Presiden akan dipilih

¹ Lihat *The Economist*, 16 Juli 1977; lihat juga pernyataan politik Menlu Amerika Serikat Henry Kissinger di Lusaka pada 28 April 1976

untuk masa jabatan lima tahun sebagai Kepala Negara dan Kepala Eksekutif, dan dalam menjalankan tugasnya akan didampingi suatu badan penasihat 35 orang, yaitu 20 orang kulit putih, 10 orang berwarna dan 5 orang India.¹

Sebaliknya kaum nasionalis kulit hitam tetap menuntut penghapusan diskriminasi dan segregasi rasial, lagi pula bagian yang wajar dalam kekayaan dan kekuasaan di Afrika Selatan. Mereka menolak program Bantustan dalam bentuknya sekarang ini sebagai siasat kulit putih untuk memecah belah rakyat kulit hitam dan mempertahankan supremasi serta kedudukan istimewa kulit putih. Mereka menuntut agar diadakan perubahan-perubahan, khususnya tambahan tanah bagi negeri-negeri Bantu dan pembentukan suatu federasi antara negeri-negeri Bantu itu dan negara kulit putih dengan persamaan hak. Sehubungan dengan itu mereka menuntut agar diadakan suatu konvensi multirasial untuk menyusun suatu konstitusi baru yang akan menuangkan gagasan-gagasan federasi itu.² Pada Konperensi Internasional anti apartheid di Lagos tersebut Sekjen PBB Kurt Waldheim rupanya mendukung gagasan itu. Antara lain dia mengatakan bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan apartheid Afrika Selatan ialah melalui suatu konvensi nasional yang terdiri atas wakil-wakil sah negeri itu. Konvensi akan berunding atas dasar persamaan semua peserta untuk menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas-asas keadilan dan perikemanusiaan.³

PROSPEK PENYELESAIAN

Kita belum tahu bagaimana masalah rasial di Afrika Selatan itu akan diselesaikan. Pemerintah PM Vorster sejauh ini berkeras untuk menolak tuntutan-tuntutan mayoritas kulit hitam dan meneruskan program Bantustan-nya yang didasarkan atas segregasi dan diskriminasi rasial terhadap rakyat kulit hitam. Sebaliknya pemimpin-pemimpin kulit hitam dan pengikut-pengikut mereka, khususnya kaum muda, menjadi semakin berani untuk menuntut penghapusan sistem

1 Lihat *Antara*, 23 September 1977; dan "Constitutional Changes Proposed", *The Economist*, 24 September 1977

2 Pada pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Bantustan pada 8 Oktober 1976 PM Vorster menolak usul mereka untuk mengadakan suatu konperensi multirasial guna menyusun suatu konstitusi baru. Lihat *Indonesian Observer*, 11 Oktober 1976, dan *The Economist*, 24 September 1977

3 Lihat *Sinar Harapan* 30 Agustus 1977

apartheid dan pembentukan suatu masyarakat multirasial atas dasar persamaan semua ras. Demikianpun tekanan-tekanan luar negeri semakin meningkat, tidak hanya dari negara-negara Afrika melainkan juga dari pihak PBB dan negara-negara barat, yang menginginkan suatu penyelesaian damai karena yakin bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan strategi maupun ekonomi mereka. Amerika Serikat bahkan telah berseru agar masalah rasial itu diselesaikan atas dasar "satu orang satu suara" sesuai dengan konsep pemerintahan mayoritas. Dan terdapat tanda-tanda bahwa negara itu tidak akan segan menggunakan kekuatannya untuk menekan Afrika Selatan ke arah penyelesaian itu.

Oleh sebab itu dapat diperkirakan, bahwa di Afrika Selatan akan terjadi perubahan-perubahan yang mencerminkan sikap-sikap baru yang berorientasi pada pengakuan martabat dan persamaan semua orang dan pada rasialisasi aspirasi-aspirasi berbagai kelompok rasialnya. Pemerintah Vorster mungkin akan mengubah program Bantustan-nya sesuai dengan tuntutan-tuntutan kulit hitam tersebut. Dengan perkataan lain, dia mungkin akan bersedia memberikan wilayah yang lebih luas kepada negeri Bantu masing-masing dan membentuk suatu federasi antara negara kulit putih dan negara-negara kulit hitam atas dasar persamaan. Dalam parlemen maupun kabinet federal akan duduk wakil-wakil dari kelompok-kelompok rasial tersebut secara proporsional. Tetapi masing-masing kelompok juga akan mempunyai parlemen dan kabinetnya sendiri. Secara demikian mereka akan dapat hidup dan berkembang sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan masing-masing, tetapi juga akan ikut dalam kekuasaan federal dan mendapatkan bagian dalam kekayaan dan pendapatan Afrika Selatan yang mereka hasilkan bersama.

Eskalasi konflik menjadi perang rasial luas yang melibatkan negara-negara lain tetap mungkin, tetapi kemungkinan ini kiranya tidak besar, khususnya karena negara-negara barat berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya dan mereka mempunyai kedudukan kuat terhadap Afrika Selatan. Negara-negara ini menyadari bahwa hanya suatu penyelesaian damai dapat menjamin keamanan kepentingan-kepentingan mereka.